

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zaniel Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Edisi Ketiga)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Basuki, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Barata, Atep Adya dan Bambang Triharyanto, 2005, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Daris , Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT indeks, Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006, *Standar Akuntansi Pemerintahan, Telaah Kritis PP. No. 24 Tahun 2005*, BPFE, Yogyakarta.
- Halim, Abdul dan, Muhammad Syam Kusufi, 2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi, Pramono, Yanuar E. Restianto, dan Icuk Rangga Bawono, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marbun, SF. dan Moh Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, UII Pres, Yogyakarta
- Margono, 2012, *Penatausahaan Barang Milik Negara*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Oxford, 2008, *Oxford Advanced Learner's Dictionary 7<sup>th</sup> Edition*, Oxford Univercity Press, New York.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tjandra, Riawan W, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, UAJY, Yogyakarta

Tjandra, Riawan W., 2008, *Hukum Hukum Keuangan Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Thoha Miftah, 2016, *Managemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, , Prenadamedia. Jakarta

Yusuf, M., 2010, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Salemba Empat, Jakarta.

### **Karya Ilmiah**

Mustika, 2012, Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang, *Tesis Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM*, Yogyakarta.

Putu Ghea Permana Tama, 2015, Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gianyar, *Tesis Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM*, Yogyakarta.

### **Makalah**

Zufkifli, Untung Afandi, Sri Handaru Yulianti, M. Khoiru Rusydi, Yansor Djaya, Winnston Potoh, Dyah Purwanti, Irwan Hercules Sitorus, Eny Santriani, Asep Agus Hemanto, “Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah”, Kursus Keuangan Daerah (KKD) 2013.

Kementerian Dalam Negeri,” *Pokok-Pokok Perubahan Permendagri tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*” disampaikan pada sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 ,tanggal 25 Oktober 2016.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156).

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Bupati Bantul No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman pengelolaan Barang persediaan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 70).

Peraturan Bupati Bantul No.37 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 37).

### **Internet**

Aryanti, Siti, “Bantul Kerja Keras Demi Kejar Predikat WTP”, <http://jogja.tribunnews.com/2015/03/09/bantul-kerja-keras-demi-kejar-predikat-wtp>, diakses pada tanggal 21 September 2016.

BPK, ”Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2015”, [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)., diakses tanggal 22 September 2016.